



## PENGARUH RASIO DERAJAT DESENTRALISASI DAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BENGKALIS

<sup>1\*</sup>Imam Fakhruddin, <sup>1</sup>Billy Yanis Saputra, <sup>1</sup>Firdaus

<sup>1</sup>Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis

e-mail: <sup>\*</sup>[imamfakhruddin0@gmail.com](mailto:imamfakhruddin0@gmail.com)

### ABSTRAK

*Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bengkalis selama 1 dekade terakhir cenderung bergerak secara negatif, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio derajat desentralisasi dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis. Data dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkalis tahun 2012-2021. SPSS Versi 26.0 digunakan untuk menganalisis data penelitian yang difokuskan ke deskriptif variabel dan diolah dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara parsial derajat desentralisasi maupun Pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis.*

**Kata Kunci:** *Pertumbuhan Ekonomi; Rasio Derajat Desentralisasi; Rasio Pertumbuhan PAD*

### ABSTRACT

*Regional economic growth in Bengkalis Regency over the past decade has tended to move negatively, far below national economic growth. This research was conducted to determine and analyze the effect of the ratio of the degree of decentralization and the growth of PAD on the economic growth of Bengkalis Regency. The data in this study were sourced from the 2012-2021 Regional Financial and Asset Management Agency in the form of a Budget Realization Report (LRA) and Gross Regional Domestic Product of Bengkalis Regency for 2012-2021. Data were analyzed using SPSS Version 26.0 which was focused on descriptive variables and processed using multiple linear regression methods. The results showed that partially the degree of decentralization and PAD growth did not affect the economic growth of Bengkalis Regency.*

**Keywords:** *Economic Growth; Decentralization Degree Ratio; PAD Growth Ratio*

## I. PENDAHULUAN

Aspek penting dari implementasi otonomi daerah adalah terwujudnya desentralisasi, tata kelola keuangan secara efektif dan efisien yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat guna memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berujung pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah adalah salah satu bentuk apresiasi dari pemerintah pusat



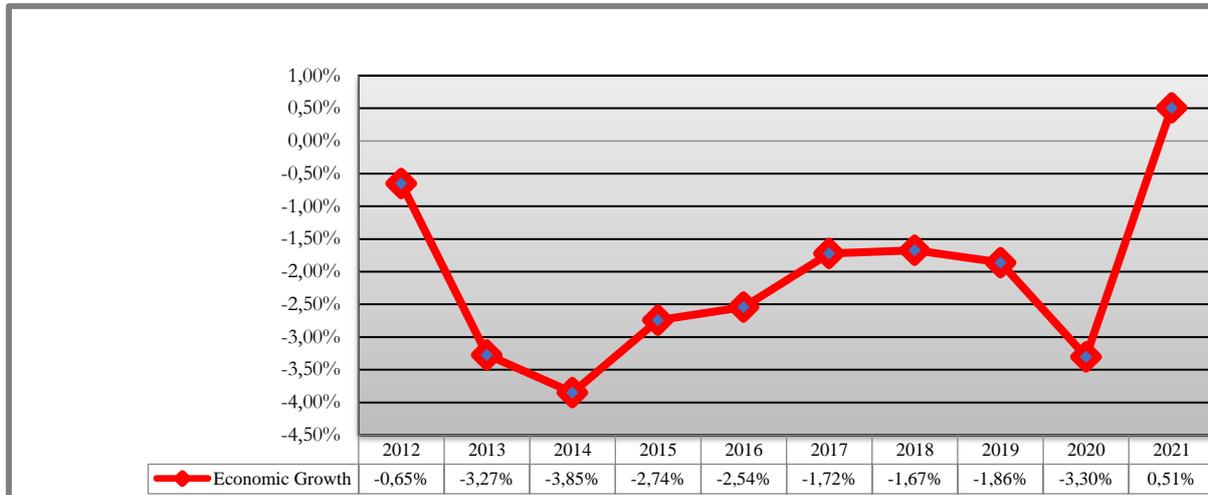
kepada masyarakat daerah supaya nantinya bisa berkreasi meningkatkan potensi lokal secara optimal. Daerahlah yang lebih mengerti dengan baik segala bentuk potensi dan polemik yang terjadi di daerah.

Kabupaten Bengkalis merupakan daerah otonom yang telah berlangsung hampir dua dekade. Oleh sebab itu, kabupaten Bengkalis senantiasa menggali keunggulan kompetitif daerah sebagai sumber pendapatan keuangan terutama untuk mencukupi keperluan keuangan pemerintah dan pembangunan. Namun demikian, banyak daerah yang masih terikat pada dana pusat untuk pelaksanaan pembangunan daerah.

Ada beberapa beberapa aspek penghambat pencapaian kinerja pemerintah daerah melakukan otonomi antara lain: transfer dana pusat masih tergolong tinggi, kurang berperannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selaku sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang masih tinggi dalam bidang perpajakan, rendahnya penerimaan pajak serta kurangnya subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Mudrajat, 2004). Sehingga fenomena ini akan berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung berdasarkan pada harga konstan tahun berjalan terhadap periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat sebagai peningkatan produksi barang serta jasa oleh seluruh badan usaha dari aktivitas ekonomi yang terdapat dari sesuatu daerah sepanjang kurun waktu setahun (Sukirno, 2017).

Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten dengan APBD terbesar di Provinsi Riau bahkan salah satu APBD yang terbesar di Indonesia. Besarnya APBD ini tentu akan mejadi lebih mudah bagi pemerintah daerah merencanakan dan mengaktualisasikan program-program untuk peningkatan perekonomian masyarakat, menumbuh kembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan seluruh sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Bengkalis. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Namun APBD yang besar ini tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis yang bergerak secara negatif di satu dekade terakhir. Data pertumbuhan ekonomi Bengkalis dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu  
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (2022)

Melalui Gambar 1 di atas bisa dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan selama 10 tahun terakhir tumbuh secara negatif. Peningkatan yang signifikan hanya terjadi di tahun 2021, mampu tumbuh secara positif sebesar 0,51%. Periode sebelumnya senantiasa terkoreksi tahun demi tahun. Dimana tahun 2020 merupakan koreksi terbesar sejak 2015 yang lalu. Pertumbuhan ekonomi Bengkulu yang bergerak negatif ini sangat jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar 5 persen setiap tahunnya di luar masa pandemi Covid-19.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan Kabupaten Bengkulu belum mampu meningkatkan produksi barang dan jasa dari bermacam bidang ekonomi yang meliputi; pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pertanian, energi, gas dan air bersih, infrastruktur, transportasi dan komunikasi, perniagaan, restoran, perhotelan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor ekonomi lainnya yang ada di Kabupaten Bengkulu. Pemerintah Bengkulu mempunyai keterikatan yang kuat terhadap pemerintah pusat melalui Dana Bagi Hasil.

Pemerintah daerah dalam menentukan perkiraan belanja modal dan infrastruktur lebih banyak daripada pengeluaran rutin, maka regulasi pemekaran daerah akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 2003). Selain itu juga peningkatan investasi modal oleh pemerintah daerah akan mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik dan akhirnya dapat meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2018).

Beberapa indikator keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah adalah rasio desentralisasi dan rasio pertumbuhan. Derajat desentralisasi menggambarkan proses pendistribusian anggaran negara kepada kabupaten/kota dengan tujuan mendukung fungsi dan tugas negara serta mengoptimalkan pelayanan publik dengan mendelegasikan kewenangan tertentu (Saragih, 2003). Sementara itu rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah diraih pada tahun sebelumnya (Ulum, 2012).

Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum sanggup meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tolak ukur derajat desentralisasi dan pertumbuhan PAD. Kontribusi PAD yang sangat minim terhadap APBD dan masih adanya ketergantungan yang tinggi dari DBH Migas. Berikut adalah perbandingan jumlah DBH Migas dan PAD Kabupaten Bengkalis.



Gambar 2. Perbandingan Jumlah DBH Migas dan PAD Kabupaten Bengkalis  
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (2022)

Dari gambar 2 di atas terlihat bahwa APBD Kabupaten Bengkalis masih sangat bergantung pada DBH migas. Sumber energi alam tak terbarukan ini merupakan pilar utama APBD Bengkalis. Ketergantungan pada migas itu tidak bisa terus berlanjut karena keterbatasan sumber daya tersebut dan sesuatu yang tidak berkelanjutan. PAD yang rendah ini mengakibatkan rendahnya belanja daerah yang digunakan untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian masyarakat (Saputra, 2022).

Sebagai lembaga publik, Bengkalis harus mengoptimalkan anggaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dalam hal ini, penyelenggaraan perekonomian daerah tidak dapat memenuhi tugasnya sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari masih lemahnya kemampuan pemerintah daerah untuk



meningkatkan derajat desentralisasi, masih kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD, masih sangat besar kesenjangan antara PAD dan DBH, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat perekonomian masyarakat dan akan mengganggu jalannya otonomi daerah di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan daerah yang lebih komprehensif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Kabupaten Bengkalis berdasarkan rasio derajat desentralisasi dan pertumbuhan PAD. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi dan Pertumbuhan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012-2021”**.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan penambahan produksi barang dan jasa (*output*) perkapita. Fokusnya ada pada tiga aspek: proses, hasil per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses, bukan sekedar gambaran ekonomi. Aspek dinamis ekonomi, atau bagaimana ekonomi berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, adalah fokus dari bagian ini (Boediono, 1999).

Menurut penjelasan Sukirno, pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan tingkat kegiatan ekonomi secara periodik. Maka, perbandingan pendapatan daerah tahunan diperlukan. Pertumbuhan ekonomi adalah gambaran kuantitatif yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi selama periode waktu tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2017). Sementara itu, Kuznets menjabarkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai barang dan jasa kepada penduduknya (Todaro, 2014). Peningkatan kapasitas tersebut dapat dicapai melalui adanya transfer teknologi dan adaptasi mekanis, institusional dan filosofis terhadap berbagai keadaan yang ada.

Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan kenaikan nilai riil. Produk domestik bruto (PDB) tidak hanya menunjukkan pertumbuhan (barang dan jasa) atau pendapatan secara makro. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Oleh karena itu, nilai uang (*money*) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

digunakan untuk menilai perubahan produksi (Setiawati, 2017). Tingginya pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari tingginya nilai PDRB menunjukkan kemajuan perekonomian daerah. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan formula berikut.

$$= \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

**PDRB t** = PDRB rill tahun sekarang

**PDRB t-1** = PDRB rill tahun lalu

## 2.2 Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Penerimaan Daerah (Mahmudi, 2018). Semakin besar PAD dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah, maka semakin baik pula rasio derajat desentralisasi. Hubungan ini dirumuskan sebagai berikut

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat diukur sebagai berikut.

| Skala Interval DDF | Kemampuan Keuangan Daerah |
|--------------------|---------------------------|
| 00.00-10.00        | Sangat Kurang             |
| 10.01-20.00        | Kurang                    |
| 20.01-30.00        | Cukup                     |
| 30.01-40.00        | Sedang                    |
| 40.01-50.00        | Baik                      |
| 50.01-60.00        | Sangat Baik               |

Table 1. Ukuran Derajat Desentralisasi Fiskal

### 2.3 Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian/kinerja yang telah diraih dibandingkan dengan periode sebelumnya (Ulum, 2012). Melalui rasio pertumbuhan dapat diketahui capaian setiap penggerak pendapatan dan pengeluaran sehingga membantu pemerintah untuk menilai peluang mana yang memerlukan perhatian.

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$X_n$  : Tahun yang dihitung

$X_{n-1}$  : Tahun sebelumnya

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 58 Tahun 2005, maka perhitungan rasio pertumbuhan dapat disesuaikan dengan mengubah biaya rutin dan pengembangan menjadi biaya operasional dan modal. Rasio pertumbuhan digunakan untuk menentukan apakah perkembangan keuangan berkembang secara positif atau negatif pada tahun anggaran atau periode anggaran yang bersangkutan. Tentu saja, pertumbuhan pendapatan yang positif dan trendnya meningkat.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif. Informasi yang dikumpulkan, diperiksa, dan kemudian dideskripsikan tanpa mencoba menggeneralisasi (Sugiyono, 2018). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif melalui penganalisaan *financial statement*/Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bengkalis.

Metode analisis regresi linier berganda bertujuan guna mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana variabel bebasnya lebih dari satu (Firdaus, 2021). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah rasio derajat desentralisasi dan variabel terikatnya rasio pertumbuhan. Data diolah dengan bantuan SPSS versi 26,0. Rumus perhitungan persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

- Y : Pertumbuhan Ekonomi  
a : Konstanta  
b<sub>1</sub>-b<sub>2</sub> : Koefisien regresi  
X<sub>1</sub> : Rasio Derajat Desentralisasi  
X<sub>2</sub> : Rasio Pertumbuhan PAD  
e : *Standard error*

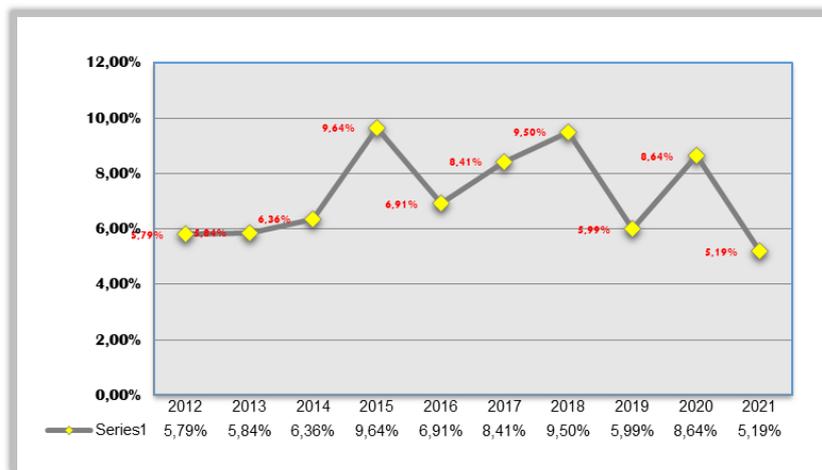
## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Rasio Derajat Desentralisasi dan Pertumbuhan PAD yang dihitung dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bengkalis tahun 2012-2021. Yang diproyeksikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB Kabupaten Bengkalis tahun 2012-2021.

#### a) Analisis Deskriptif Derajat Desentralisasi (X<sub>1</sub>)

*Trend* pergerakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2021 dapat dilihat sebagai pada gambar berikut.



Gambar 3. *Trend Rasio Derajat Desentralisasi*  
Sumber: Diolah Penulis (2022)

Dari Gambar 3. Di atas dapat dilihat bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bengkalis bergerak dari angka 5,19% - 9,64%. Terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2021 akibat adanya pandemi Covid-19, adanya pembatasan pergerakan manusia yang juga berdampak terhadap menurunnya jumlah *income* dari roro penyebarangan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Hasil pengukuran memperlihatkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis tidak dapat secara mandiri melaksanakan otonomi daerah secara efektif. Bahkan setelah dua dekade melaksanakan otonomi daerah, ketergantungan pemerintah Bengkalis kepada pusat masih sangat tinggi. Ketergantungan terhadap dana yang besar dari bagi hasil dari migas ini tentu sangat mengkhawatirkan karena minyak dan gas merupakan sumber yang tidak dapat diperbaharui dan jumlahnya sangat terbatas serta jelas tidak dapat dijadikan sebagai sumber utama APBD dalam jangka panjang.

Derajat desentralisasi yang rendah ini mengindikasikan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk memaksimalkan PAD yang digunakan untuk membiayai belanja operasional/rutin dan belanja modal/pembangunan. Tentu saja, hal tersebut tidak memaksimalkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat Bengkalis. Pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan sumber PAD di Kabupaten Bengkalis secara optimal. Hal ini juga menunjukkan bahwa pajak daerah belum optimal, aset produksi daerah belum dikelola secara baik, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bengkalis belum beroperasi secara optimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis juga perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi untuk memaksimalkan PAD.

#### b) Analisis Deskriptif Pertumbuhan PAD ( $X_2$ )

Rasio pertumbuhan PAD menggambarkan sejauh mana kemampuan daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan pencapaian atas PAD dibandingkan dengan periode sebelumnya. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi pertumbuhan PAD yang potensial untuk dikembangkan. Berikut adalah hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Bengkalis.

| No. | Tahun | PAD               | Pertumbuhan PAD |
|-----|-------|-------------------|-----------------|
| 1   | 2011  | Rp206.231.805.423 |                 |
| 2   | 2012  | Rp205.979.691.675 | -0,12%          |
| 3   | 2013  | Rp181.667.217.189 | -11,80%         |
| 4   | 2014  | Rp253.347.320.754 | 39,46%          |
| 5   | 2015  | Rp258.889.532.216 | 2,19%           |
| 6   | 2016  | Rp199.026.650.970 | -23,12%         |
| 7   | 2017  | Rp271.865.595.908 | 36,60%          |
| 8   | 2018  | Rp319.280.511.092 | 17,44%          |
| 9   | 2019  | Rp226.245.884.732 | -29,14%         |
| 10  | 2020  | Rp251.925.869.916 | 11,35%          |
| 11  | 2021  | Rp216.507.758.130 | -14,06%         |
|     |       | <b>Rata-Rata</b>  | <b>2,88%</b>    |

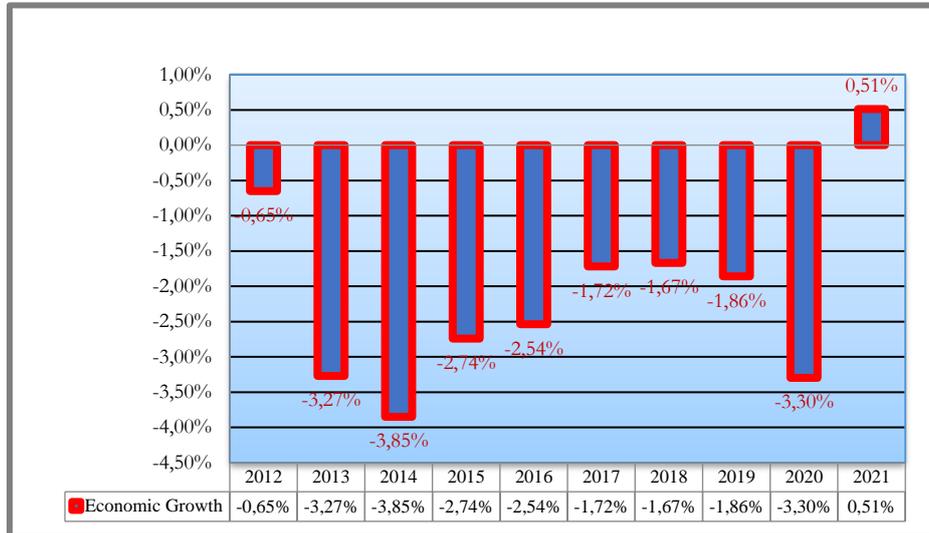
Table 2. Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Bengkalis  
Sumber: Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 2. dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Bengkalis 2012-2021 sangat tidak stabil. Terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2021. Ketidakstabilan pertumbuhan PAD ini menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya upaya peningkatan PAD yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa penerimaan pajak, retribusi dan bagi hasil BUMD tidak sesuai dengan tugas. Tingkat PAD yang rendah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak optimal dalam meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak daerah dan BUMD belum mampu memaksimalkan potensi. Hal ini juga tidak terlepas dari BUMD PT. Badan Usaha Milik Daerah Bengkalis Bumi Laksamana Jaya (BLJ) tidak bisa menjalankan unit khusus sendiri, termasuk APMS Air Putih, yang dijalankan pihak ketiga, sehingga keuntungan untuk daerah tidak maksimal.

### c) Analisis Deskriptif Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis diukur menggunakan *trend* dengan tahun 2012 sebagai tahun dasar seperti gambar dibawah ini.



Gambar 4. Trend Pertumbuhan Ekonomi  
Sumber: Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Gambar 4 di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan selama 10 tahun terakhir tumbuh secara negatif. Peningkatan hanya terjadi di tahun 2021, selanjutnya senantiasa terkoreksi tahun demi tahun.

#### d) Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis regresi linier berganda ditujukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel *independent* (Derajat Desentralisasi dan Pertumbuhan PAD) dan variabel *dependent* (Pertumbuhan Ekonomi). Untuk hasil yang lebih spesifik para ahli menggunakan program SPSS versi 26.0 dengan menggunakan metode Enter. Strategi Enter dilakukan dengan memasukkan semua faktor independen sebagai faktor indikator. Semua faktor akan dipertimbangkan untuk penelitian untuk memutuskan apakah faktor independen mempengaruhi variabel dependen.

Hasil dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 3. berikut ini:

| Model | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |   |      |       |      |      |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|---|------|-------|------|------|
|       | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t | Sig. |       |      |      |
|       | B                           | Std. Error | Beta                      |   |      |       |      |      |
| 1     | (Constant)                  | -.765      | 2.289                     |   |      | -.334 | .748 |      |
|       | Rasio Pertumbuhan PAD       | -.011      | .022                      |   |      | -.191 | .483 | .644 |
|       | Derajat Desentralisasi      | -.182      | .315                      |   |      | -.228 | .577 | .582 |

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Table 3. Hasil Regresi Linier Berganda  
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26.0 (2022)

Berdasarkan Tabel 3. di atas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut.

$$Y = -0,765 - 0,011X_1 - 0,182X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

X<sub>1</sub> = Derajat Desentralisasi

X<sub>2</sub> = Pertumbuhan PAD

#### e) Uji t (Parsial)

Uji t dimaksudkan untuk melihat apakah variabel *independent* yaitu derajat desentralisasi (X<sub>1</sub>) dan pertumbuhan PAD (X<sub>2</sub>) secara parsial berpengaruh terhadap variabel *dependent* yaitu pertumbuhan ekonomi (Y).

Hasil uji t hitung dapat dilihat pada Tabel 3. **Pengujian Hipotesis Pertama**

Hasil pengujian hipotesis Pertama (H<sub>1</sub>) yang menyebutkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Tabel 3. di atas dapat dilihat:

$$t_{\text{hitung}} = -0,483 > t_{\text{tabel}} = -2,306$$

maka tolak H<sub>1</sub> (terima H<sub>0</sub>)

$$\text{Sig. tabel} = 0,644 > (\alpha) = 0,05$$

Dapat disimpulkan bahwa derajat desentralisasi ( $X_1$ ) sebagai variabel bebas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y$ ). Dengan demikian semakin rendah tingkat derajat desentralisasi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis.

### Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil pengujian hipotesis Kedua ( $H_2$ ) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Tabel 3. di atas dapat dilihat:

$$t_{\text{hitung}} = -0,577 > t_{\text{tabel}} = -2,306$$

maka tolak  $H_1$  (terima  $H_0$ )

$$\text{Sig. tabel} = 0,582 > (\alpha) = 0,05$$

Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PAD ( $X_2$ ) sebagai variabel bebas tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y$ ) sebagai variabel terikat. Dengan demikian semakin rendah tingkat pertumbuhan PAD tidak mempengaruhi *economic growth* Kabupaten Bengkalis.

## 4.2 Pembahasan

### a) Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi ( $X_1$ ) sebagai variabel bebas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y$ ). Dengan demikian semakin rendah tingkat derajat desentralisasi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat derajat desentralisasi fiskal, yang berarti tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah belum bisa untuk meningkatkan potensi kabupaten yang ada sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari porsi pendapatan asli daerah yang masih rendah dibandingkan total penerimaan daerah secara absolut. Polemik ini juga tidak terlepas dari tidak optimalnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kabupaten Bengkalis, masih rendahnya kesadaran wajib pajak/retribusi serta kegagalan pemerintah daerah untuk merancang program-program produktif guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus kembali menggerakkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menjalankan secara mandiri unit-unit bisnis yang dimiliki oleh BUMD tersebut. Selama ini banyak dikelola oleh pihak ketiga. Untuk meningkatkan PAD pemerintah Bengkalis perlu meningkatkan sosialisasi tentang peningkatan minat masyarakat untuk membayar pajak. Karena

realisasi PAD yang belum optimal menghilangkan sumber-sumber pemasukan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amagoh, 2012), (Lin, 2000) yang menunjukkan bahwa *fiscal decentralization* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *economic growth*.

### b) Pengaruh Pertumbuhan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD yang sangat fluktuatif dan beberapa tahun tumbuh secara negatif tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis. Dimana PAD sebagai sumber dana yang dapat menggerakkan roda perekonomian dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor produktif yang ada di Kabupaten Bengkalis. Untuk itu pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu menggali potensi-potensi daerah untuk mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Bengkalis yang merupakan daerah pesisir, memiliki kekayaan laut yang belum sepenuhnya diberdayakan pemerintah daerah. Memanfaatkan kekayaan laut dan pantai yang luas untuk menghasilkan produk-produk perikanan unggulan daerah yang mampu bersaing di kancan internasional. Hal ini akan mampu meningkatkan pertumbuhan PAD. Selain itu juga optimalisasi dari objek retribusi diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan PAD.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang rendah akan mempengaruhi lajunya pertumbuhan ekonomi. Dimana PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jadi jika PAD yang fluktuatif dan tumbuh secara negatif maka pemerintah daerah akan terbatas untuk merancang program-program peningkatan ekonomi masyarakat sehingga tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azhari, 2020) yang memperlihatkan bahwa pertumbuhan PAD tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## V. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat derajat desentralisasi fiskal yang mengindikasikan bahwa tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis terhadap dana bantuan dari pemerintah pusat.



- 
2. Pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bengkalis. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan PAD yang sangat fluktuatif dan beberapa tahun tumbuh secara negatif tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Bengkalis.

## REFERENSI

- Amagoh, A. (2012). "An Examination of the Impacts of Fiscal Decentralization on Economic Growth". *International Journal of Business Administration*, 3(6).
- Azhari, M. et.al. (2020). "Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh". *Jurnal Manajemen Indonesia*, 05(01).
- Boediono. (1999). *Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*. BPFPE.
- Firdaus. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0*. Dotplus.
- Lin, J. Y. and Z. L. (2000). "Fiscal Decentralization and Economic Growth in China". *Economic Development and Cultural Change*, 49(1).
- Mahmudi. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntnasi Sektor Publik*. Andi.
- Mudrajat, K. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Airlangga.
- Saputra, B. Y. et.al. (2022). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Kabupaten Bengkalis". *E-Qien*, 11(01).
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Setiawati, I. (2017). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, dan Tenaga Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pinarang*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2017). *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. Kencana.
- Todaro, M. (2014). *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*. Erlangga.
- Ulum, I. (2012). *Audit Sektor Publik*. Bumi Aksara.